

SISTIM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL di KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI FISKAL

OLEH:

Ranny Emilia, Desna Aromatica, Irawati, Ahmad Negara Dalimunthe

Nomor Kontrak : 065/J.16/PL/DIPA/V/2006

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mempelajari dan mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Pemerintah Daerah Tanah Datar. Pertama, Bagaimana Penerapan Sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, kedua apa strategi yang digunakan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan.

Untuk memberikan kejelasan dalam menganalisa pertanyaan di atas, penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui Wawancara mendalam (*depth interview*), Pengamatan intensif (observasi), dan Dokumentasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan PAD kabupaten Tanah Datar didasarkan pada kreativitas dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan. dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan inovasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk menambah PAD dengan melakukan beberapa hal seperti; Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan, Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru, Menintensifkan pengihan dan peningkatan monitoring, Melaksanakan *Cash Management*. Dengan melakukan hal-hal tersebut PAD Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 17 milyar Rupiah pada tahun 2005.

Terkait dengan pelaksanaan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah tanah datar telah menyampaikan laporan keuangannya secara periodik di website yang mereka miliki dan dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat. Penyampaian laporan keuangan ini kepada umum menjadi sebuah indikasi adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pemakaian anggaran pendapatan belanja daerah tersebut. Selain itu juga apabila ditinjau dari segi transparansi setiap masyarakat juga memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perkembangan dana di daerah tersebut, terutama di tingkat pemerintahan nagari.